



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.

JAZ

JURNAL AKUNTANSI UNIHAZ



JAZ

VOLUME 5

NOMOR 1

BENGKULU, JUNI 2022

ISSN: 2620-8555

Penanggung Jawab	: Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Penanggung Jawab Redaksi	: Helmi Herawati, S.E., M.Si
Pimpinan Redaksi	: Helvoni Mahrina, SE., MM
Dewan Penyunting	: 1. Dr.Fachruzzaman, SE, MDM, AK, CA (Universitas Bengkulu) 2. Dr.Rini Indriani, SE, M.Si, Akt (Universitas Bengkulu)
Sekretariat	: Seftya Dwi Shinta, SE., M.Ak
Operator Web	: Elviza Diana, S.Kom., M.Kom
Alamat Redaksi	: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Jl.A.yani No 1 Kota Bengkulu. Tlp: (0736) 21536. Email: jazunihaz@gmail.com Web : https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz

MITRA BESTARI

No	Nama Reviewer	Perguruan Tinggi
1	Dr. DWI ERMAYANTI SUSILO, SE.MM	STIE PGRI Dewantara Jombang
2	Dr. Alistraja Dison Silalahi, SE., M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
3	Bambang Arianto, SE., M.Ak	STISIP Banten Raya
4	Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt., CA., BKP., ACPA., CRA., CRP., AWP., CPIA., QWP., CHRM., CADE., CTA.	Universitas Jember
5	Dwi Prastiyo Hadi. SE.M.Si	Universitas PGRI Semarang
6	Debby Chyntia Ovami, S. Pd , M.Si	Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
7	Decky Hendarsyah, S.Kom., M.Cs.	STIE Syariah Bengkulu

TIM EDITOR

No	Nama Editor	Perguruan Tinggi
1	Helmi Herawati, S.E., M.Si	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
2	Iwin Arnova, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
3	Helvoni Mahrina, S.E., M.M	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
4	Nina Yulianasari, S.E., M.Sc	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
5	Winny Lian Seventeen, S.E., M.Ak	Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

DAFTAR ISI

PENGARUH VOLUME USAHA DAN HARGA POKOK PENJUALAN TERHADAP SISA HASIL USAHA Kiki Nurohmah, Eris Darsawati, Acep Suherman	1-11
PENGARUH RASIO LIKUIDITAS DAN RASIO SOLVABILITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI Jihan Lestiana	10-21
PENGARUH <i>CURRENT RATIO</i> DAN <i>TOTAL ASSET TURNOVER</i> TERHADAP <i>GROSS PROFIT MARGIN</i> SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR HOTEL, RESTORAN DAN PARIWISATA Elza Nurul Izzah, Sulaeman dan Ade Sudarma	22-31
PRESTASI MAHASISWA DI NILAI DARI KONDISI EKONOMI KELUARGA DAN KOMPETENSI DOSEN Winy Lian Seventeen, Nina Yulianasari	32-37
PENGARUH KELANGKAAN MINYAK GORENG TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL DAN PENGELOLAAN LABA PADA UMKM USAHA MAKANAN DI DESA CIKEMBAR Muhamad Hisab Idang Nurodin	38-46
ANALISIS METODE PEMBAYARAN <i>PAYLATER</i> DARI DIMENSI KEPERCAYAAN DAN KEAMANAN Gusi Putu Lestara Permana, Adek Ika Elsiani	47-57
ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU DALAM PERENCANAAN PRODUKSI PADA PT. OLYMPIC FURNITURE GEMILANG BOGOR Erika Yunira, Gatot Wahyu Nugroho	58-69
PENGARUH BIAYA BAHAN BAKU DAN HARGA JUAL TERHADAP LABA PADA HOME INDUSTRI SARI BUMI Rendi Heryandi, Evi Martaseli dan Ade Sudarma	70-75
ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKABUMI Siti Amelia	76-84

<p>PREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE ALTMAN Z-SCORE MODIFIKASI Reisa Nurul Fadilah</p>	<p>85-92</p>
<p>PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA BENGKULU Seftya Dwi Shinta, Levy Oktri Darti</p>	<p>93-100</p>
<p>ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PENILAIAN KINERJA PUSAT PENDAPATAN PT.SUMBER SATWA SEJAHTERA DI MEDAN Tasya Rahma Dayani Pohan, Laylan Syafina</p>	<p>101-111</p>
<p>ANALISIS POTENSI TERJADINYA <i>FINANCIAL DISTRESS</i> DENGAN MENGGUNAKAN METODE <i>SPRINGATE (S-SCORE)</i> PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI Siti Istiana</p>	<p>112-122</p>
<p>PENGARUH PERSENTASE DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT PERUSAHAAN DAN KUALITAS AUDITOR EKSTERNAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2015-2019 Novi Cahyati</p>	<p>123-131</p>

ANALISIS KINERJA BELANJA DAERAH DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Siti Amelia

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
sitiamelia230500@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of regional expenditures on the Budget Realization Report (LRA) at the Regional Financial and Asset Management Agency of Sukabumi Regency.

The research method used is descriptive qualitative analysis technique. The population in this study is the entire Budget Realization Report (LRA) at the Regional Financial and Asset Management Agency of Sukabumi Regency for the 2018-2020 period. And the sample used is the Budget Realization Report (LRA) for the 2018-2020 period. The sampling method used is nonprobability with purposive sampling technique using data analysis consisting of; Regional Expenditure Variance Analysis, Regional Expenditure Growth Analysis, Regional Expenditure Harmony Analysis, Regional Expenditure Efficiency Ratio Analysis. For data collection used are observation, interviews, and documentation. From the results of the study, it was found that the performance of Sukabumi district expenditure in terms of realization was stated to be running well. However, there is still a need for more optimization and improvement in terms of the use of the budget by the Regional Financial and Asset Management Agency.

Key words: *Performance Analysis, Spending, Budget Realization Reports.*

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi zaman sekarang ini, pengembangan kualitas kehidupan masyarakat yang merupakan bagian utama dari suatu bangsa dan negara membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah yang terintegrasi secara baik dari pusat hingga ke daerah. Dan di dalam penerapan otonomi daerah sering terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat ini masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan adanya kesenjangan ekonomi sosial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Pengelolaan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah terwujud dari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu pemanfaatan sumber daya yang dilakukannya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Menurut (Heristam, 2015) "Menyatakan kinerja keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya dan untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan". Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sebagai salah satu cara untuk pemerintah daerah mengelola keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan penatausahaan atau akuntansi, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kesuksesan otonomi daerah sendiri tidak terlepas dari peran pemerintahan dalam mengelola keuangannya. Dan melalui pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui kemampuan anggaran daerahnya untuk membiayai belanja daerah, serta menunjukkan bahwa uang atau dana publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam penyusunan laporan keuangan harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mencapai good governance. Terkait dengan standar akuntansi ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAP 01 yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Menurut (Ratmono, d., & Sholihin, 2019:25) “Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan laporan mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu tahun anggaran. Jika dibandingkan dengan neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menduduki urutan yang lebih penting karena Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Laporan realisasi anggaran (LRA) terdiri dari anggaran pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya”.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi merupakan lembaga atau instansi pelayanan publik yang bertugas dalam pengelolaan keuangan baik pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini sangatlah penting bagi BPKAD Kabupaten Sukabumi untuk melakukan berbagai analisis penggunaan anggaran dan belanja. Analisis ini diperuntukkan untuk menilai dan mengevaluasi apakah kegiatan belanja daerah terlaksana dengan efektif dan efisien dalam penggunaan anggarannya. Sebagai contoh perbandingan anggaran belanja dan realisasi belanja daerah dari tahun ketahun sebagai berikut:

Table 1.1

Laporan anggaran Belanja Dan Realisasi Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018-2020 (Ribuan Rupiah)

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	Rp3.552.015.199.598	Rp3.295.457.180.961	92,78
2019	Rp3.652.141.971.841	Rp3.473.545.785.677	95,11
2020	Rp3.600.880.597.766	Rp3.414.747.311.436	94,83
Total	Rp10.805.037.769.205	Rp10.183.750.278.074	94,24%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Sukabumi (BPKAD)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah anggaran belanja BPKAD Kabupaten Sukabumi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengalami kenaikan, hal ini berbeda dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2020 jumlah anggaran belanja mengalami penurunan dari tahun 2019. Jumlah anggaran belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp 3.600.880.597.766 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 3.652.141.971.841. Penurunan tersebut diakibatkan terjadinya beberapa kali pergeseran anggaran untuk menanggulangi dan mengantisipasi kondisi *Pandemic Covid – 19* sesuai regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan

adanya penurunan tersebut dapat memicu terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Oleh karena itu analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk melihat apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD dengan ekonomis, dan sebaik mungkin, tidak mengeluarkan anggaran yang tidak diperlukan dan menghindari pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, terdapat metode analisis anggaran yang dapat digunakan salah satunya analisis belanja yaitu berupa Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja dan Rasio Efisiensi Belanja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Sukabumi jika dilihat menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu untuk mengetahui kinerja belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kabupaten Sukabumi jika dilihat menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan rasio efisiensi belanja.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut (Halim, 2012) "Merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan dan pelaporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan". Sedangkan menurut (Sujarweni, 2015:1) "Akuntansi sektor publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di Lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan suatu organisasi public yang menyediakan informasi keuangan bagi Lembaga-lembaga tinggi negara.

Pengertian anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik menurut (Sujarweni, 2015:28) "Adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana public dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang public".

Menurut (Halim, A., dan Kusufi, 2016:48) "Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja".

Berdasarkan pengertian anggaran Sektor publik tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pemerintah merupakan rencana yang dibuat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Anggaran dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses penilaian kinerja yaitu sebagai alat, stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian.

Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut (Mahmudi, 2019:69) Ada beberapa jenis anggaran yaitu:

1. *Line Item Budget*

System anggaran ini menyajikan belanja berdasarkan input atau sumber daya yang digunakan, tetapi tidak mengukur efisiensi dan efektivitas program karena tidak dilakukan pengkaitan antara input dengan output.

2. *Incremental Budget*

Incremental Budget merupakan system penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah anggaran dengan menggunakan data anggaran tahun lalu sebagai dasar anggaran tahun depan. Dalam praktiknya *Incremental Budget* seringkali diikuti dengan *system line item budget*.

3. *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS)

PPBS merupakan system penganggaran yang penyusunan anggarannya berdasarkan program. Setiap unit kerja memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi yang dituangkan dalam renstra unit kerja.

4. *Zero Based Budget* (ZBB)

Zero Based Budget merupakan system penganggaran yang berbasis nol atau mulai dari nol. ZBB menjadikan setiap anggaran merupakan anggaran yang baru sehingga dimulai dari nol.

5. *Performance Budget*

Performance Budget merupakan system penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (*input*) dengan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut (Ratmono, 2017:25) "Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan laporan mengenai perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi dalam satu tahun anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya".

Periode Pelaporan Realisasi Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP 03 mengenai Laporan Realisasi Anggaran paragraph 10, periode pelaporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih Panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Pengertian Pengukuran Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas selama periode tertentu yang dapat diukur keberhasilannya. (Bastian, 2017) "Mengungkapkan bahwa kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi".

Sedangkan menurut (Mahsun, 2016:25) "Pengukuran kinerja merupakan suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial".

Pengertian Belanja Daerah

Menurut (Mahmudi, 2019:153) “Belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya Kembali oleh pemerintah daerah”.

(Mahmudi, 2019:154) “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah, tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah”.

Analisis Varians Belanja

(Mahmudi, 2019:155) “Mengungkapkan analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara anggaran dengan realisasi belanja”. Berdasarkan LRA yang disajikan, pengguna laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Selisih disukai (Favourable Variance) dan
- b. Selisih tidak disukai (Unavourable Variance)

Analisis ini dirumuskan sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja – Anggaran Belanja.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu keseimbangan dan Kesehatan fiskal daerah. Menurut (Mahmudi, 2019:158) “Analisis pertumbuhan belanja ini bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Dan alasan kenaikan belanja itu biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasioanal dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Pertumbuhan belanja dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t - 1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t - 1} \times 100\%$$

Analisis Keserasian Belanja

(Mahmudi, 2019:160) “Mengungkapkan bahwa analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah”.

Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan daerah rendah pada umumnya justru memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi jika dibandingkan pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Hal ini disebabkan pemerintah daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja modal sebagai bagian dari investasi modal jangka Panjang, sedangkan pemerintah daerah yang pendapatannya tinggi biasanya telah memiliki asset modal yang mencukupi. Pada umumnya proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah antara 5-20 persen.

Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Belanja

(Mahmudi, 2019:164) “Mengungkapkan bahwa rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah”. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat mutlak, tetapi relative, yang artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relative dan lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadinya pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

3. METODE PENELITIAN

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran periode 2018-2020. Sampel yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran, metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Nonprobability Sampling* teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang dimana teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan analisis untuk menjelaskan kinerja belanja daerah terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi.

Dengan menggunakan:

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 4.1

Hasil Analisis Varians Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun (1)	Anggaran (Rp) (2)	Realisasi (Rp) (3)	Varians/Selisih (4)	(%) (5)
2018	3.552.015.199.598,00	3.295.457.180.961,00	(256.558.018.637,00)	92,78%
2019	3.652.141.971.841,00	3.473.545.785.677,00	(178.596.186.164,00)	95,11%
2020	3.600.880.597.766,00	3.414.747.311.436,00	(186.133.286.330,00)	94,83%
Rata-rata				94,24%

Sumber: Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil analisis varians belanja daerah yaitu: pada tahun 2018 memiliki selisih Rp (256.558.018.637,00) dengan persentase perbandingan 92,78%, tahun 2019 memiliki selisih Rp (178.596.186.164,00) dengan persentase perbandingan 95,11%, dan tahun 2020 memiliki selisih Rp (186.133.286.330,00) dengan persentase perbandingan 94,83%.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 4.2

Hasil Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

Tanggal Anggaran (1)	Realisasi Belanja Thn t-1 (2)	Realisasi Belanja Thn t (3)	Kenaikan / Penurunan (4)	Hasil Analisis (%) (5)
2018-2019	3.295.457.180.961,00	3.473.545.785.677,00	178.088.604.716,00	5%
2019-2020	3.473.545.785.677,00	3.414.747.311.436,00	58.798.474.241,00	-2%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel diatas kenaikan pertumbuhan belanja daerah terjadi pada tahun 2018-2019 yaitu sebesar 5% dengan jumlah Rp 178.088.604.716,00, kenaikan tersebut dikarenakan adanya penerimaan Pegawai Negeri Sipil salah satu program tersebut ialah peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang dimana

untuk belanja pegawai sebesar Rp 1.404.959.221.860,00 atau 97,40% dari anggaran sebesar Rp 1.442.471.520.242,00 dan untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.338.383.031.550,00 atau 94,09% dari anggaran sebesar Rp 1.422.487.667.282,00. Sedangkan untuk terjadinya penurunan itu terjadi pada tahun 2019-2020 yang dimana mengalami penurunan sebesar -2% dengan jumlah Rp 58.798.474.241,00. Menurut ibu Eneng Nopyanti menurunnya belanja daerah ini dikarenakan sepanjang tahun 2019-2020 ini terjadi beberapa kali pergeseran anggaran untuk menanggulangi dan mengantisipasi kondisi *pandemic covid-19* yang dimana sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dan hal ini juga berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis belanja operasi terhadap total belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	2.673.104.085.159,00	3.295.457.180.961,00	81,11%
2019	2.865.394.692.606,00	3.473.545.785.677,00	82,50%
2020	2.759.065.507.253,00	3.414.747.311.436,00	80,79%
Rata-rata			81,46%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel diatas, di tahun 2018 rasio yang ditunjukkan pada hasil analisis menunjukkan pada angka 81,11% dari total belanja daerah Rp 3.295.457.180.961,- pada tahun 2019 menunjukkan angka persentase sebesar 82,50% dari total belanja daerah Rp 3.473.545.785.677,- dan untuk tahun 2020 menunjukkan angka persentase sebesar 80,79% dari total belanja daerah sebesar Rp 3.414.747.311.436.

Kenaikan belanja operasi sepanjang tahun 2018-2020 itu dengan rata-rata peningkatan 81,46% hal ini disebabkan sepanjang tahun 2018-2019 terjadi peningkatan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagai dampak dari penerimaan pegawai PNS berlangsung pada tahun tersebut.

b. Analisis belanja Modal terhadap total belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio (%)
1	2	3	4
2018	614.381.109.002,00	3.295.457.180.961,00	18,64%
2019	603.785.439.571,00	3.473.545.785.677,00	17,38%
2020	449.098.859.238,00	3.414.747.311.436,00	13,15%
Rata-rata			16,39%

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi di tahun 2018 rasio yang ditunjukkan pada hasil analisis menunjukkan pada angka 18,64% dari total belanja daerah daerah Rp 3.295.457.180.961,- sedangkan pada tahun 2019 menunjukkan angka persentase 17,38% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari total belanja daerah Rp 3.473.545.785.677,- dan rasio untuk ditahun 2020 menunjukkan pada angka 13,15% dan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dari total belanja daerah Rp 3.414.747.311.436,-. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan tidak banyaknya melakukan belanja modal seperti tahun-tahun sebelumnya

dan untuk anggaran belanja pada tahun 2020 pun mengalami penurunan jumlah anggaran belanja hal tersebut dikarenakan dari dampak *pandemic covid-19*”.

4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 4.5

Hasil Analisis Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi (%)	Kategori
1	2	3	4	5
2018	3.552.015.199.598,00	3.295.457.180.961,00	93,77%	Efisien
2019	3.652.141.971.841,00	3.473.545.785.677,00	95,10%	Efisien
2020	3.600.880.597.766,00	3.414.747.311.436,00	94,83%	Efisien
Rata-rata			94,56%	Efisien

Sumber: Data Olahan (2022)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hasil analisis tingkat efisiensi belanja daerah menunjukkan angka rasio efisiensi pada tahun 2018: 93,77% dengan hasil kategori kriteria sudah efisien dan untuk tahun 2019 mencapai angka 95,10% dengan hasil kategori kriteria sudah efisien. Tahun 2020 menunjukkan 94,83%. Walaupun dari tahun 2018-2020 terlihat fluktuasi, namun kenaikan penurunan tersebut tidak terjadi secara signifikan, hal ini terjadi dikarenakan anggaran belanja daerah yang disesuaikan dengan kebijakan APBD yang diatur setiap tahunnya mengenai belanja langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan rata-rata 94,56%.

Sehingga realisasi anggaran belanja langsung terhadap anggaran belanja daerah dinyatakan Efisien sesuai dengan kriteria Perda dan dapat diartikan bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis varians belanja secara keseluruhan pemerintah daerah kabupaten sukabumi pada tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar Rp (256.558.018.637,00) untuk tahun 2019 sebesar Rp (178.596.186.164,00) dan pada tahun 2020 menunjukkan nilai sebesar Rp (186.133.286.330,00). Hal ini berarti bahwa realisasi belanja tidak melebihi anggaran belanja sehingga dapat dikategorikan baik. Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan belanja maka diketahui pertumbuhan belanja pemerintah kabupaten sukabumi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah positif atau lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 178.088.604.716,00 dengan hasil persentase sebesar 5%, hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten sukabumi telah mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Sedangkan untuk pertumbuhan belanja pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 58.798.474.241,00 dengan hasil analisis persentase -2% hal ini terjadi karena pada tahun tersebut sedang mengalami kondisi *pandemic covid-19* yang akhirnya mengakibatkan penurunan pertumbuhan belanja.

Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja yaitu rasio belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah yang dimana total belanja operasi pada tahun 2018 sebesar 81,11% untuk tahun 2019 menunjukkan di angka persentase 82,50% dan untuk tahun 2020 persentasenya sebesar 80,79% dan hasil rata-rata untuk rasio belanja operasi sebesar 81,46%. Sedangkan untuk rasio belanja modal pada tahun 2018 sebesar 18,64% dan untuk tahun 2019 sebesar 17,38% dan pada tahun 2020 rasio persentase sebesar 13,15% maka rata-rata hasil analisis rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 16,39% maka hal tersebut menunjukkan adanya kinerja yang cukup baik karena masih berada dalam proporsi belanja yaitu antara 5-20%.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja secara keseluruhan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan adanya penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah karena tidak melebihi dari 100% yaitu tahun 2018 sebesar 93,77%,

2019 sebesar 95,10% dan untuk tahun 2020 sebesar 94,83% dengan hasil rata-rata rasio efisiensi sebesar 94,56%.

Sehingga realisasi anggaran belanja langsung terhadap anggaran belanja daerah dinyatakan Efisien sesuai dengan kriteria Perda dan dapat diartikan bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik.

Dari hasil dilakukannya analisis kinerja belanja daerah untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi diketahui bahwa hasil analisis dikatakan baik karena dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 untuk realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan serta perolehan rasio yang baik. Hal ini bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat mempertahankan kinerja tersebut dan lebih meningkatkan serta lebih memperhatikan kinerja dalam pengelolaan belanja daerah dari APBD yang diterima, dan untuk pertumbuhan belanja pada BPKAD diharapkan lebih memperhatikannya agar tidak terjadinya penurunan pertumbuhan belanja.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam melakukan penelitian agar lebih rinci terperinci lagi. Selain itu, juga dapat menambahkan analisis yang digunakan dan untuk menambah variabel sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih lengkap dari pada hasil penelitian oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Salemba Em).
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik; Teori, Konsep & Aplikasi*. Salemba Empat.
- Heriristam. (2015). *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. UT Perpustakaan Digital.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Ratmono, d., & Sholihin, S. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN.
- Ratmono, D. dan M. S. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.